

**ANALISIS KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Bersatu Pekon

Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

Provinsi Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

DESMASUSILAWATI

NPM. 1551010162

Jurusan : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Desa merupakan pusat dari kegiatan perekonomian bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan dimulai dari tahap bawah yaitu desa. Pemerintah saat ini mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah masuk dalam UU yang khusus mengatur pembangunan desa. Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu demobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Hadirnya BUMDES merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui potensi desa yang dibentuk langsung sesuai inisiatif pemerintah pekon dan masyarakat. Kondisi yang demikian mendorong peneliti untuk merumuskan permasalahan yaitu: bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUM-Pekon Mandiri Bersatu) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menurut persepektif ekonomi Islam? Adapun yang menjadi tujuan peneliti yaitu: untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kontribusi BUMDES mandiri bersatu terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUM-Pekon) Mandiri bersatu pekon Gisting Bawah kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bertempat di pekon Gisting Bawah kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, penelitian ini bersifat *deskriptif*. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 26 orang. Sedangkan sample dalam penelitian ini diambil 26 orang dengan rician sampel diambil dari pengurus BUMDES 10 orang, aparat pekon 2 orang dan masyarakat pekon Gisting Bawah diambil 14 orang. dengan metode pengambilan sample yaitu *Random Sampling*. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Sedangkan teknik mengolah data melalui 2 tahapan yakni, pemeriksaan data dan sistematik data. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan teknik verifikasi (kesimpulan). Adapun hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa BUM-Pekon Mandiri Bersatu di pekon Gisting Bawah sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di pekon Gisting Bawah. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, minimnya pengetahuan masyarakat akan BUMDES, masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit-unit usaha yang ada dan kurang maksimalnya kinerja pengurus seperti mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang BUM-Pekon Mandiri Bersatu itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan Islam, masyarakat pekon Gisting Bawah dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan *Al-Dharuriyyah* (primer), *Al-Hajjiyyah* (sekunder) dan *Al-Thsaniyyah* (pelengkap).



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Letkol H. Endro Suratmi Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabararakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESMA SUSILAWATI
NPM : 1551010162
Jurusan/Prodi : EKONOMI SYARI'AH
Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabararakatuh

Bandar Lampung, 28 Oktober 2019
Penulis,

DESMA SUSILAWATI
NPM. 1551010162



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Letkol H. Endro Suratmi Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi
Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Bersatu Pekon Gisting
Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)**

Nama : **DESMA SUSILAWATI**
Npm : **1551010162**
Jurusan : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan diperintahkan dalam Sidang Munaqosah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Nanif, S.E., M.M.

NIP. 1974082320000 31001

Pembimbing II,

Mardiyah Hayati, S.P., M.S.I.

NIP. 197605292008012010

Ketua Jurusan,

Madnasir, S.E., M.S.I.

NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Letkol H. Endro Suratmi Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"** (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Bersafu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung) disusun oleh, **DESMA SUSILAWATI, NPM : 1551010162**, Program Studi Ekonomi Syaria'ah, telah di ujikan dalam sidang Munasqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin/ 16 Desember 2019.**

Tim Penguji

Ketua Siding : Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd

Sekretaris : Okta Suprianingsih, S.E., M.E.Sy.

Penguji I : Budimansyah, M.Kom.I

Penguji II : Hanif, S.E., M.M

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Dr. Khusnul Ghofur, S.Ag., M.Si
NIP.198008012003121001

MOTTO

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Yang demikian itu karena Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹

Q.S Al-Anfal (8) : 53



¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 184.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena dengan rahmad dan karunia-NYA hari ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang juga amanah dari kedua orang tua dalam mengemban pendidikan.

1. Kedua orang tuaku tersayang, ALM. Bapak Mazeni dan Ibu Mulyana yang memberikan dukungan serta motivasi dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan selalu mendoakanku agar terus berada di dalam jalan-Nya, semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dan keridhoan di dalam setiap langkahnya.
2. Saudara-saudari ku Susanti Diana, Idiyanto S.Sos, Dian Safitr S. Pdi, Indra Dodi Gunawan. Latifatun Hanifan dan Gibran Noval Alhusayn. yang memberikan dukungan dan doa kepadaku dalam penulisan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba Ilmu yakni UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap DESMA SUSILAWATI, Nama panggilan Desma, lahir pada tanggal 6 Juli 1995. anak ketiga dari empat (4) bersaudara dari pasangan Bapak Mazini dan Ibu Mulyana. Beralamat di Pekon Kejadian Lom, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Riwayat pendidikan penulis:

1. SD Negeri 1 Kejadian Lom lulus pada tahun 2009
2. MTS Madrasah Tsanawiyah lulus pada tahun 2012
3. SMA IT Al- Mujtama Al- Islami Jati Agung lulus pada tahun 2015
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Ekonomi Syariah.



Bandar Lampung, 28 Oktober 2019
Yang membuat,

DESMA SUSILAWATI
NPM. 1551010162

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung).** dapat terselesaikan shalawat serta salam kita sanjungkan agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih kepada pihak lain yang mendukung penulisan skripsi ini diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
2. Bapak Madnasir, S.E.,M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ekonomi Islam dengan baik dan lancar.
3. Bapak Hanif, S.E.,M.M. dan Ibu Hj. Mardiyah Hayati, S.P.,M.S.I. selaku Pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan kritik, saran motivasi dan arahan hingga dapat terselesaikannya Skripsi ini.
4. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika Fakultas.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan Ilmu pengetahuannya kepada kami.
6. Kepada seluruh keluarga besar Ekonomi Islam kls A 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tetap pada lindungan Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
G. Kerangka Berpikir	15
H. Metodologi Penelitian	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Otonomi Desa	23
B. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	26
1. Pembangunan Desa	26
a. Pembangunan Desa dalam aspek Fisik	27
b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insane	27
2. Pemberdayaan Masyarakat	28
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	30
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa	30
2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa	31
3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	32
4. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa	33
5. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	36
6. Keuangan BUMDES	36
7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES	37
D. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam	38
1. Pengertian dan Hukum Kesejahteraan	38
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	40
E. Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kesejahteraan Masyarakat	43
2. Indikator kesejahteraan	45
3. Konsep kesejahteraan dalam Islam	49
4. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	55
1. Sejarah Singkat Pekon Gisting Bawah	56
2. Kondisi Wilayah	57
3. Keadaan Penduduk	58

4. Keadaan Sosial Ekonomi	59
5. Kondisi Sosial Budaya	60
B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pekon Gisting Bawah	62
1. Organisasi	62
2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Bersatu	62
3. Fungsi Badan Usaha Milik Desa Mandiri Bersatu	64
4. Tujuan Pembentukan BUM-Pekon Gisting Bawah	64
5. Visi dan Misi BUMDES	65
6. Struktur Kepengurusan BUM-Pekon Gisting Bawah	66
C. Unit kegiatan usaha BUMDEs Pekon Gisting Bawah	67
D. Kontribusi Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Mandiri Bersatu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	69

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Kontribusi Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Mandiri Bersatu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	72
1. Klasifikasi Jenis Unit Usaha BUMDES	74
2. Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat	79
B. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. saran	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel tingkat kesejahteraan masyarakat pekon Gisting Bawah	9
Tabel Sejarah Kepemimpinan Kepala Pekon Gisting Bawa dari	56
Tabel Struktur Pemerintahan Pekon Gisting Bawah	67
Tabel Jarak Orbitrasi Pekon Gisting Bawah	57
Tabel Jumlah Penduduk Pekon Gisting Bawah	58
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	58
Tabel Lembaga Pendidikan	59
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	60
Tabel Rata-rata pendapatan penduduk	60
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	61
Tabel Sarana Peribadatan Di Pekon Gisting Bawah	62
Tabel Struktur Kepengurusan BUM-Pekon Gisting Bawah	67
Hasil wawancara	72



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat permohonan izin pra riset
2. Surat balasan izin pra riset
3. Surat permohonan izin riset
4. Surat balasan izin riset
5. Pedoman wawancara
6. Dokumentasi Penelitian
7. Daftar Nana Informasi Penelitian
8. Surat konsultasi Pembimbing Akademik
9. Surat pernyataan plagiattisme
10. Berita acara seminar proposal
11. Berita acara munaqosah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi yang dibuat. Dan suatu proses penekanan terhadap pokok atau substansi dari permasalahan yang akan dibahas secara dominan. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada Badan Usaha Milik Desa Mandiri Bersatu Pekon Gisting bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)”**. Untuk itu perlu adanya pengertian dari istilah-istilah yang ada didalam judul tersebut sebagai berikut :

1. **Analisis** dalam istilah penelitian adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena suatu objek dengan memanfaatkan informasi yang tersedia.¹
2. **Kontribusi** merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.²

¹ Ridwansyah, *Pendidikan Dasar Perbankan Syariah*, (Kumpulan Diklat Pembiayaan, Lampung, 2009), h.3

² Surwo Budiarto, *Studi Tentang pemungutan Retrebusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Samarang*, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 2 No. 4, 2016.

- 3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)** Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Indonesia membentuk suatu badan usaha milik desa yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pembangunan desa. Pembentukan BUMDES merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.³
- 4. Kesejahteraan Ekonomi** kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.⁴ Ekonomi adalah Ilmu mengenai azas-azas produksi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.⁵
- 5. Perspektif Ekonomi Islam** adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk

³ Edy yusuf Agunggunanto dkk, *pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES)*, vol 13 no 1, 2016.

⁴ Amirus Sidiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No 2, Desember 2015.

⁵ P3EI (pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam), *Ekonomi Islam*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h.17.

mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud skripsi ini adalah suatu penelitian untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di pekon Gisting Bawah, yang berlokasi di BUM-Pekon Mandiri Bersatu yang ada di pekon Gisting Bawah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif dan subjektif adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah, yang dimana masih terlihat adanya ketimpangan Kesejahteraan di pekon tersebut, dengan adanya antusias Masyarakat Pekon Gisting Bawah untuk menggunakan BUMDES Mandiri Bersatu tersebut masih relatif rendah, maka dari itu penelitian ingin melihat bagaiman kontribusi Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting.

⁶*Ibid. Ekonomi Islam*, h. 19

2. Alasan Subjektif

- a. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca dan pihak pemerintah Pekon Gisting Bawah sendiri tentang Kontribusi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
- b. Pokok bahasan yang ada didalam skripsi ini sesuai dengan kedisiplinan ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Titik berat suatu pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui 70 % dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.⁷

Pembangunan sendiri merupakan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan desa dan kota. Pembangunan pedesaan dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan dalam arti

⁷ Khairul Amri, *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13. No 3, Juli 2015.

peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.⁸

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan masyarakat sekitar. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.⁹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan Lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan Sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan ekonomi Desa dengan menciptakan dan meningkatkan peluang usaha, lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan desa sampai pada titik Kesejahteraan Masyarakat. Jika pengelolaan BUMDES optimal maka Desa akan menjadi Desa yang makmur secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan sebagai salah satu mitra Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana pembangunan dan perekonomian dengan tuntutan mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan

⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 3.

⁹ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul*, Vol.28 .No. 2. 2016.

usaha.¹⁰ Pembentukan BUMDES merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.¹¹

Kontribusi BUMDES bagi desa yang menjalaninya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah Kabupaten/Kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di

¹⁰Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (Pades) Serta Membutuhkan Perekonomian Desa*, jurnal Of And Development, Volume 5 No. 1, 2014

¹¹*Ibid*, Edy yusuf agung gunanto, h. 213.

pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah pemerintah, baik pusat atau daerah.¹²

Di Kabupaten Tanggamus tepatnya di kecamatan Gisting terdapat 7 desa/kelurahan dengan sebutan pada umum Pekon Gisting bawah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gisting. Pekon Gisting bawah dengan luas Wilayah 262,5 ha, dengan jumlah KK 2.144, penduduk sebanyak 8.178 jiwa, dan kepadatan 1.194 jiwa. Masyarakat Pekon Gisting bawah sebagian besar bekerja sebagai petani, industri, jasa, pegawai Negri, pengrajin dan suwasta. Sektor pertanian/perkebunan khususnya tanaman pangan merupakan penunjuk perekonomian terbesar penduduk yang dimana sebagai sentra produksi sayur-mayur dan palawija, dengan memiliki wilayah yang berpotensi alam yang sangat besar terutama sumber mata air. Sebagian besar untuk pemenuhan kebutuhan sayur-mayur dan palawiji di wilayah Bandar Lampung di pasok dari wilayah Gisting.

Pekon Gisting Bawah merupakan Desa yang dikenal dengan Desa yang memiliki sumber mata air banyak dan hasil pertanian juga banyak, sebelum adanya BUMDES Masyarakat belum bisa memanfaatkan potensi yang ada di pekon Gisting Bawah dengan keadaan ini pemerintah desa membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan didirikan pada 05 Februari 2015 badan usaha ini kemudian diberi nama Badan Usaha Milik

¹²*Ibid.* Amalia Sri Kusuma dewi, h. 234

Pekon Mandiri Bersatu (BUM-Pekon Mandiri Bersatu) yang dimana peraturan Desa Pekon Gisting Bawah yang mengatur tentang BUMDES pasal 5 tentang tujuan pembentukan BUM-Pekon salah satunya yaitu mengembangkan usaha masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pekon Gisting Bawah dengan mendirikan dan mengembangkan BUM-Pekon mandiri bersatu. Adanya BUM-Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah diharapkan dapat lebih menggerakkan roda perekonomian Pekon Gisting Bawah sehingga berdampak pada peningkatan pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akhirnya pada titik kesetaraan hidup masyarakat desa yang sejahtera.¹³ Dari hasil survei pengamatan penelitian tentang BUM-Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah.

Badan Usaha milik pekon Gisting Bawah menjalankan beberapa jenis unit usaha untuk menambah kas atau pendapatan desa yaitu:¹⁴

1. Unit Usaha Air Bersih (Pam Pekon)
2. Unit usaha Bank Sampah
3. Unit Usaha Pariwisata (Dam dan Alam)
4. Unit Usaha (*Cathering*)
5. Unit Usaha Penyewaan (Penyewaan GSG)
6. Unit Usaha Ternak Kambing

¹³Bela Aldila dkk. *Factor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus badan usaha milik pekon di pekon Gisting bawah*, Jila, Vol 6 No.2, 2018.

¹⁴ *Dokumentasi*, profi Badan Usaha Milik pekon (BUM-Pekon) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Tahun 2018

BUM-Pekon Mandiri Bersatu pekon Gisting Bawah sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun belakangan tetapi keberadaan BUM-Pekon Mandiri Bersatu masih terlihat adanya ketimpangan kesejahteraan di pekon tersebut, dapat dilihat dari data tabel tingkatan kesejahteraan di Pekon Gisting Bawah pada tahun 2015-2018.

Table 1.1
Tingkat kesejahteraan masyarakat Pekon Gisting Bawah

No	Tingkat Kesejahteraan	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Keluarga Sejahtera	392	400	423	428
2	Jumlah Keluarga Sejahtera 1	187	197	190	195
3	Jumlah Keluarga Sejahtera 2	257	267	270	285
4	Jumlah Keluarga Sejahtera 3	419	429	430	432
5	Jumlah Keluarga Sejahtera 3 Plus	12	17	20	26
Jumlah Kepala Keluarga (KK)		1,267	1,310	1,333	1,366

Sumber : Dokumentasi Data Desa Pekon Gisting (2019)

Jumlah tingkatan keluarga pra sejahtera di Pekon Gisting Bawah masih terlihat tinggi. Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMD-Pekon) Mandiri Bersatu yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli Desa dan juga mengentaskan Kemiskinan Masyarakat tetapi hampir 4 (empat) tahun berdirinya Badan Usaha tersebut ternyata belum dapat Mensejahterakan seluruh Masyarakat di Pekon Gisting Bawah.

Implementasi BUMDES di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan BUMDES masih belum berjalan maksimal. Pemerintah pekon Gisting Bawah sebenarnya sudah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti adanya sosialisasi tentang BUMDES, penyuluhan pemakaian unit usaha air bersih (PAM Pekon), unit usaha Bank sampah, unit usaha pariwisata (Dam dan Alam), Unit usaha *cathering*, unit usaha penyewaan GSG, dan unit usaha ternak kambing. Dengan adanya itu tetapi masih ada masyarakat yang belum tergugah untuk bergabung dan memanfaatkan adanya BUMDES. Padahal BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Yang dimana keadaan masyarakat setelah adanya BUMDES masih ada sebagian yang tidak mengetahui kegiatan yang dilaksanakan pengurus BUMDES. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk lebih lanjut mengetahui kontribusi BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat studi kasus di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Bersatu dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting ?
- b. Bagaimana Kontribusi BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat menurut persepektif ekonomi islam ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tujuan penelitian pada hakekatnya merupakan berupa atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kontribusi BUMDES Mandiri bersatu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pekon Gisting Bawah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kontribusi BUMDES Mandiri bersatu terhadap kesejahteraan masyarakat menurut persepektif ekonomi Islam.

2. Manfaat penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan memperoleh hasil yang diharapkan dan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan.

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan ilmu ekonomi terutama dalam ekonomi Islam.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah maupun pemerintah desa agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya masyarakat kesejahteraan sosial masyarakat Gisting Bawah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan hal yang bermanfaat. Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan peneliti saat ini karena untuk memudahkan bagi peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Penelitian ini modelnya sama penelitian terdahulu, namun perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti, tahun penelitian, permasalahan yang terjadi di wilayah yang akan diteliti dan kebijakan yang sesuai untuk diterapkan di wilayah tersebut.

1. Dewi Kirowati, lutfiyah dwi S. pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Studi kasus Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Pengembangan Badan Uasa Milik Desa manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap Ekonomi Pedesaan dan Budaya Masyarakat.¹⁵
2. Ratna Aziz Prasetyo, (Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro) menemukan bahwa, Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan BUMDES masih rendah, hal ini terlihat dari pengetahuan Masyarakat tentang program BUMDES. Program kegiatan BUMDES di Desa Pejambon belum banyak diketahui oleh Masyarakat.¹⁶
3. Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni: 2016 dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul, Yogyakarta” Menemukan bahwa Keberadaan BUMDES membawa

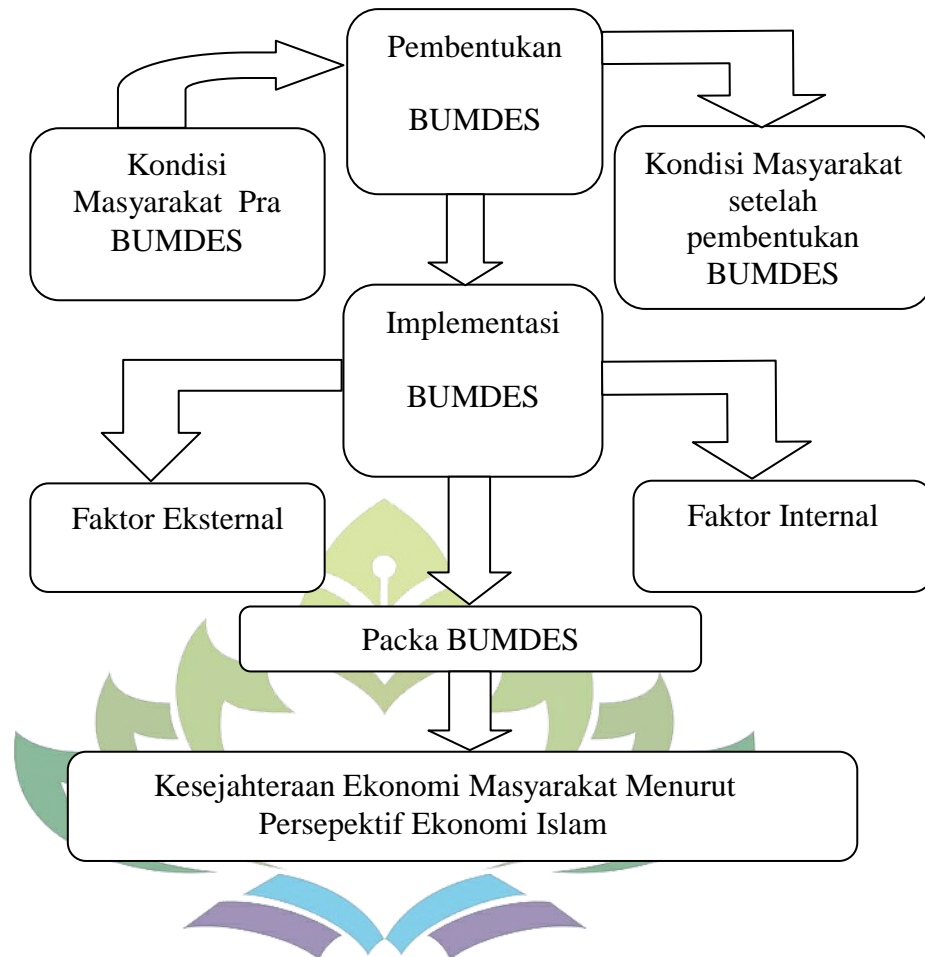
¹⁵Dewi Kirowati, lutfiyah dwi S. *pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa studi kasus, Desa Kecamatan Karasmm Kabupaten Magetan*. Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Imformasi) Vol, 1. No. 1, Mei 2018.

¹⁶Ratna Aziz Prasetyo, *Peranan BUMDES Dalam Pembangunan DanmPemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Dialektika Volume XI No.1 (Maret 2016), h. 98

perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial. Pergeseran nilai sosial dan juga perubahan pola interaksi antar warga akan terjadi. BUMDES memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDES tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan Kesejahteraan warga. Komunikasi dan sosialisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh BUMDES. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi memunculkan ketidakpercayaan warga kepada kemampuan pengelola dalam pengelolaan BUMDES. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi ini memunculkan tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDES.¹⁷

¹⁷*Ibid.* Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, h. 155.

G. Kerangka Berpikir



Kondisi masyarakat pra BUMDES ekonomi desa berbasis konvensional atau manual yang dilakukan masyarakat Gisting bawah, dimana mereka hanya melakukan kegiatan pertanian saja tidak bisa memutar hasil pertanian mereka, SDA dan SDM belum teredukasi serta tidak terkelola dengan optimal. BUMDES dibentuk oleh pemerintah Pekon yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah pekan dan masyarakat. Di dasarkan atas adanya kebutuhan dan potensi Pekon, dalam upaya memperkuat perekonomian serta membangun kerekatan sosial masyarakat Pekon. Kondisi masyarakat setelah

pembentukan BUMDES beberapa masyarakat pekon Gisting Bawah antusias dengan sistem BUMDES pada aspek pengelolaan ekonomi dan bisa meningkatkan kreatifitas masyarakat.

Terdapat faktor *eksternal* yang timbul diantaranya sulitnya penyelenggaraan loyalitas serta perhatian instansi terkait dan belum memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Terdapat faktor *internal* yang timbul diantaranya kurangnya sosialisasi pengurus BUMDES terhadap masyarakat, kurangnya SDM yang berminat pada BUMDES Mandiri Bersatu, sarana dan prasarana masih belum memadai/seadanya, membutuhkan dana untuk mengembangkan unit-unit usaha yang ada di Pekon Gisting Bawah. Paska BUMDES masyarakat sebagian sudah mengerti dengan kondisi dan kegiatan yang di laksanakan pengurus BUMDES selain itu sebagian masyarakat sudah mulai menggunakan pasilitas yang ada di BUMDES dan masyarakat mulai ikut serta dalam unit-unit usaha BUMDES Mandiri Bersatu untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat di Pekon Gisting Bawah.

H. Metodologi Penelitian

Untuk menerapkan teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan mambantu memecahkan permasalahan. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung:Alpabeta, 2012), h. 13

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara *intensif* tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁹ Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap respon yang ada di pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kab. Tanggamus. Data-data dikutip sebagai rujukan yang kemudian dianalisa dan dijadikan bahan pembahasan.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang sedang berlaku, Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.²⁰ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terhadap perspektif ekonomi Islam.

¹⁹ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, metodologi penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.

²⁰ Emzir, *metode penelitian pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 9

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian, penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan pengurus BUMDES dan masyarakat pekon Gisting bawah.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, berupa profil Pekon Gisting Bawah dan profil Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Populasi dalam penelitian ini 2.144 KK yang ada di 7 dusun di pekon Gisting Bawah dari keseluruhan pengurus BUMDES dan beberapa masyarakat pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *random sampling* adapun *random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. menurut Arikunto “penentuan pengambilan sample kualitatif sebagai berikut. Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Berdasarkan pendapat diatas, sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 32 orang. Hasil ini di dapatkan kerna populasi berjumlah lebih dari 100 maka di ambil 15% dari keseluruhan populasi. Dengan rincian sampel diambil dari pengurus BUM-Pekon Mandiri Bersatu dan masyarakat Pekon Gisting Bawah.

²¹Sugiyono, *Metodelogi Penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D* (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 80.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam usaha menghimpun data di lokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode yakni:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) secara real serta juga melihat kesejahteraan masyarakat Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan adanya pengelolaan BUMDES disana.

b. Wawancara/ interview

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari interview atau informasi dengan wawancara langsung.²² Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau yang akan di wawancarai adalah pengurus BUMDES dan beberapa masyarakat Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catetan harian, cinderamata, laporan, file dan

²² *Ibid.* sugiono, h. 152

flashdisk serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.

d. Pengolahan data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan, menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
2. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematik bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Teknik Analisis Data

a. Tahap reduksi data

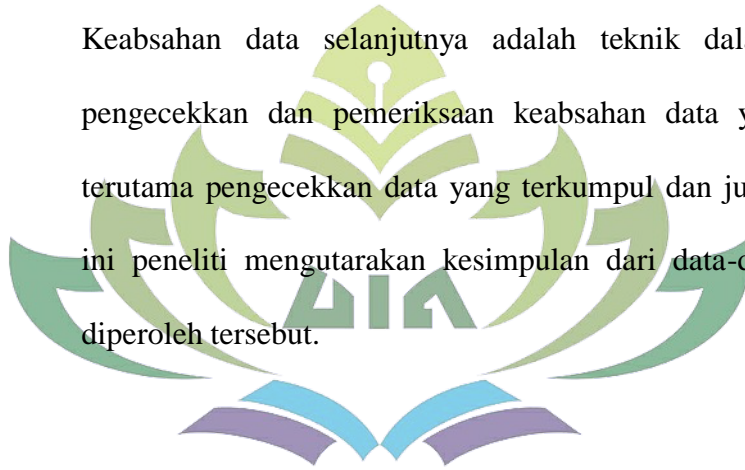
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Tahap penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Tahap Verifikasi Data/kesimpulan

Keabsahan data selanjutnya adalah teknik dalam melakukan pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh, terutama pengecekan data yang terkumpul dan juga pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh tersebut.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum, publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dituntut dan menuntut di muka pengadilan.²³

Desentralisasi pembangunan identik dengan membuat perencanaan pembangunan cukup sampai desa saja. Desa oleh kerananya mempunyai kemendirian dalam perencanaan pembangunan tanpa *intruksi* dan *intervensi* pemerintah. Disinilah kemudian peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sebagai lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara perintah Desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi desa.²⁴

Otonomi desa merupakan suatu peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Otonomi desa dipandang sebagai

²³ HAM Widjaja, Otonomi Desa, *Merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh*, (jakarta : rajagrafindo persada, 2014), h. 165.

²⁴ Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintah Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemeberdayaan Masyarakat Dan Desa, Depatemen Dalam Negeri 2007.

cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Otonomi desa sebagai perwujudan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, yang merupakan penerapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan secara vertikal. Dengan demikian otonomi desa memberikan keluasaan bagi terbukanya potensi-potensi yang ada di desa tersebut.

Otonomi Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan otonomi desa pengambilan keputusan lebih dekat kepada rakyat yang dilayani. Rentang kendali pemerintah menjadi lebih dekat, sehingga pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan, potensi dan kapasitas desa yang spesifik, dengan begitu diharapkan pelayanan masyarakat akan lebih baik karena dengan otonomi desa, desa dapat lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas keinginan rakyat di desanya.

Pada era sekarang ini otonomi desa diatur oleh undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan pengertian bahwa otonomi desa merupakan desentralisasi kewenangan dari pemerintah ke pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian

pemerintah desa memiliki urusan-urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab desa sepenuhnya.²⁵

Melalui kedua peraturan perundang-undangan tersebut ekonomi desa merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi dimana desa yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keluasaan untuk berekspresi. Pemberian otonomi yang luas kepada desa juga memperlancar, mengembangkan dan memacu pembangunan di desa, memperluas peran serta masyarakat lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi desa. Sehingga kesenjangan antar desa dapat dikurangi karena masing-masing desa akan membuka wawasan untuk membangun dan bekerja dengan pihak ketiga.

Konsekuensinya desa harus mampu dan “mandiri” dalam menyelenggarakan pemerintahan desanya. Tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin tinggi otonomi desa. Jika tidak besar kemungkinan akan digabung dengan desa lain. Sebab tidaklah efektif bila desa yang otonom selalu menggantungkan kehidupannya pada subsidi pemerintah pusat.

Sehingga dapatlah dikatakan, otonomi merupakan salah satu strategi dalam suatu proses pembangunan guna menghadapi berbagai hambatan baik institusi maupun administrasi yang dengan kata lain

²⁵ *Ibid.* HAW Widjaja, h. 170

otonomi adalah upaya untuk mendorong proses demokratisasi. Otonomi haruslah mampu menggali potensi yang ada di desa guna mencapai tujuan yang positif berupa percepatan pembangunan dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat.

B. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembangunan Desa

Fenomena perdesaan mengilustrasikan dimensi-dimensi konseptual pembangunan yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kurangnya kapasitas administratif. Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.

Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.²⁶

²⁶ *Ibid.* h. 393.

Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:²⁷

- a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skil dan memberdayakan masyarakat didaerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

²⁷ *Ibid.* Rahardjo Adisasmita, h. 17.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat pembangunan yang berpusat pada manusia, pembangunan *partisipatoris*, pemberdayaan dan berkelanjutan *people centered, development participatory, empowering and sustainable*.²⁸ Pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan dengan usaha menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan publik.²⁹

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat. sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemeberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang

²⁸Hasyemi Rafsanjani, dkk, *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Study Pada Dasa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Public (JAB), Vol. 1, No. 4, hal. 67-72.

²⁹Ahmad Qodri, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*, (Jakarta: LEC Pess, 2003), h. 21.

sama atau memberi modal saja. Tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:³⁰

- a. Akses terhadap sumber daya.
- b. Akses terhadap teknologi.
- c. Akses terhadap pasar.
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan

Keempat akses ini disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya juga diperlukan peran aktif dari kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk usaha bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan harga diri manusia terutama mereka yang berada dalam lilitan kemiskinan dan ketidak berdayaan. Jika seseorang berdaya berarti dia telah berhasil memandirikan dirinya. Oleh karena itu agar seseorang atau komunitas berdaya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan akses atau iklim dimana potensi masyarakat tersebut bisa berkembang. Dalam Islam, konteks pemberdayaan, sebagaimana Allah berfirman dalam (Qs. Al-Jumu'ah ayat 10).

³⁰ *Ibid.* HAW Widjaja, h. 169

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

*Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.*³¹

Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah telah memotivasi manusia untuk terus berusaha, mencari rezeki sehingga bisa mengentaskan kemiskinan baik pada dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat di sekelilingnya. Dengan demikian, pemberdayaan pada masyarakat bisa dilaksanakan.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³²

Dasar pembentukan BUMDES adalah pasal 108 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 yang berbunyi “Desa dapat memiliki Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undang”. kemudian

³¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hikmah, Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 554.

³² Herry Kamaroesid, *tata cara pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa*, (Jakarta : mitra wacana media, 2016), h. 2.

pemerintah mengamanatkan lagi dalam pasal 213 Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 yang berbunyi, yaitu:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undang.
- c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undang.

2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUMDES didasarkan atas prakasa Desa yang mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
- 2) Potensi usaha ekonomi desa;
- 3) Sumber daya alam di desa;
- 4) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDES; dan
- 5) Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa diserahkan untuk dikelola sebagian dari usaha BUMDES.

Pendirian BUMDes harus disepakati melalui musyawarah desa. Musyawarah desa atau disebut nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, dan unsure masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menepati hal yang bersifat strategis.³³

3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas;³⁴

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diklaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. *Kooperatif* Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif* Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

³³ David Wijaya, *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 13-139

³⁴ *Ibid.* Hery Kamaroesid, *tata cara pendirian*, h. 29

- c. *Emansipatif* Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
 - d. *Transparan* Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
 - e. *Akuntabel* Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
 - f. *Sustainabel* Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.³⁵
4. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa
- Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung keseluruhan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang di kelola oleh Desa dan/atau kerja sama antara desa. Dalam pasal 3 permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan:
- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
 - b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi Desa;

³⁵ *Ibid.* David Wijaya, h. 137-138

- d. Mengembangkan rencan kerja sama usaha antara desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaluin perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Oleh kerna itu, BUMDes dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efesien, profesional dan mandiri.³⁶

Untuk mencapai tujuan BUMDes tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa dan dikelola masyarakat dan pemerintahan Desa. Pemenuhan kebutuhan ini

³⁶ *Ibid.* Heri Kamaroesid, h. 18-19

diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha Desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi Desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (di luar desa) dengan menetapkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.³⁷

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.³⁸ BUMDES adalah suatu badan yang memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan sebagai lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat.³⁹

³⁷ Ketut Gunawan, *Manajemen BUMDES Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi*, Dalam *WIDYATECH* Jurnal sains dan Teknologi, Vol. 10 No.3 April 2011, h. 65.

³⁸ Singgih Tri Atmojo, kris Herdrijanto, "Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", dalam *Jurnal Kesejahteraan Sosial UNEJ* (jember), Vol, 1. No 1, h. 2.

³⁹ Edy Yusuf Agung gunanto, Fitrie ariati, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).", dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Bisnis*, (Semarang), Vo, 13 No.1/1 Maret 2016, h. 69

5. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 Sampai Pasal 142
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.⁴⁰

6. Keuangan BUMDES

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman,

⁴⁰ Gabriel hany Kusuma dan Nurul Purnamasari, *BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan*. (Jakarta: Penabulu foundation, 2016), h.23.

penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.⁴¹

7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

- a. BUMDES *Banking* adalah BUMDES yang bertipe *Banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.
- b. BUMDES *Serving* adalah BUMDES *Serving* ,mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAM Des.
- c. BUMDES *Brokering* dan *Renting* Sebelum ada BUMDES sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalankan usaha Desa

⁴¹ *Ibid.* h. 31

dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran traktor, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri.

- d. BUMDES *Trading* adalah BUMDES yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat.⁴²

D. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

1. Pengertian dan Hukum Kesejahteraan

Kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti dimana masing-masing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang disebut dengan kesejahteraan. Islam memberikan pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan system kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayyatan toyyiban*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata tetapi terpenuhinya kebutuhan spiritual.⁴³

⁴² *Ibid.* Heri Kamaroesid, h. 3-5

⁴³ Gathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 17

- 1) Kesejahteraan *holistik* dan seimbang yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula Manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial.
- 2) Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di akhirat. juga alam setelah kematian/kemusnahan dunia. Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia.⁴⁴

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep-konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.⁴⁵ Dalam bentuk kesejahteraan dalam Ekonomi Islam Allah berfirman dalam (Qs. Al-A'raf ayat 160).

⁴⁴ *Ibid.* P3EI, h. 5

⁴⁵ Zainuddin Sarda, "Kesejahteraan dalam Persepektif Islam pada karyawan Bank syariah". Sardar et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 3 No. 5, 5 Mei 2016, h. 395

وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَلَهُ قَوْمُهُ ۚ
 أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ
 أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ ۖ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ ۖ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا
 مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya: dan Kami membagi mereka menjadi dua belas suku yang masing-masing berjumlah besar, dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah dari (batu)itu dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa (kami berfirman): "Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu." mereka tidak Menzalimi Kami, tetapi merekalah yang selalu Menzolimi dirinya sendiri. (Qs. al-A'raf: 160).⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh baik berupa material, moral, sosial maupun secara spiritual.

2. Indikator kesejahteraan masyarakat

Ekonomi adalah kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan hidupnya. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus didapat dan bila tidak terpenuhi mengganggu fisik manusia, sedangkan

⁴⁶ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hikmah, Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 171.

keinginan sesuatu yang di dapat dan bila tidak terpenuhi maka akan terganggu fisiknya.⁴⁷

Tercukupnya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Sedangkan kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan oleh tiga kebutuhan dasar seperti yang diungkapkan oleh *Al-syathibi* yaitu:⁴⁸

1) *Al-Dharuiyah* (Kebutuhan Primer) yaitu kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia, bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *al-Dharuriyyah* ini dalam buku ushul fiqh, termasuk *As-syathibi* membagi menjadi lima hal yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan serta terjaga dan terlindunginya harga diri

⁴⁷ Adiwarman Karim, *Sejahtera Pemikir Islma*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 12

⁴⁸ Muslimin kara, “*Pemikiran As-syathibi Tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*”. Vol. 2 No. 2, 2015

dan kehormatan seseorang dan keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.⁴⁹

2) *Al-Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder) yaitu suatu kebutuhan dimana apabila tidak terwujudnya kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya atau dapat dikatakan seperti kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya.⁵⁰

3) *Al-Tahsinniyyah* (Kebutuhan Tersier) yaitu *Al-tahsinniyyah* adalah suatu keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.⁵¹

⁴⁹ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istilahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), h. 40.

⁵⁰ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Kultural*, (Jakarta: Lantabora PRESS, 2005), h. 163.

⁵¹ Yusuf Al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 2009), h. 79.

E. Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.⁵² Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua orang secara keseluruhan anggota masyarakat. kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.⁵³

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

⁵² *Ibid.* Amirus Sidiq, h. 137

⁵³ Rudy Bahrudin, *ekonomi otonomi desa*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012), h.145.

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c. Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dilihat dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah terpenuhnya kebutuhan dasar dan dapat menjalankan fungsi sosial berdasarkan standar kehidupan masyarakat.

2. Indikator kesejahteraan

Ekonomi konvensional membuat indikator kesejahteraan berdasarkan beberapa sudut pandang yang berbeda, diantaranya yaitu.⁵⁴

a. Adam Smith, Menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat akan tercapai bila dipenuhi empat prinsip ekonomi dasar, yaitu:

- a) Prinsip keseimbangan produksi dan konsumsi
- b) Prinsip manajemen tenaga kerja
- c) Prinsip manajemen modal
- d) Prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat.

b. Menurut Miles terdapat Empat indikator digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu keluarga, yaitu:

- a) Rasa aman
- b) Kebebasan
- c) Kesejahteraan
- d) Jati diri

Menurut BKKBN terdapat lima indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan keluarga sejahtera. Dari beberapa indikator kesejahteraan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.* Ziauddin Sardar, h. 165.

⁵⁵ Subdirektorat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*, (Jakarta: badan pusat statistic, 2008), h. 17.

a. Pendapatan yaitu merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- a) Tinggi (Rp.>5.000.000)
- b) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)
- c) Rendah (< Rp.1.000.000)

b. Konsumsi Pengeluaran yaitu pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan

persentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan.⁵⁶

- c. Pendidikan yaitu beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain: angka melek huruf (AMH), tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM), indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam kesejahteraan wajib belajar 9 tahun.
- d. Kesehatan yaitu kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan unsure kesejahteraan masyarakat. Drajat kesehatan masyarakat harus dipelihara dan ditingkatkan. Penduduk yang sehat akan lebih mudah dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kesehatan masyarakat dapat menjadi investasi dan membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing bagi pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Tercapai tujuan pembangunan kesehatan perlu didukung oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Upaya yang dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan akan menjamin kehidupan yang

⁵⁶ *Ibid.* Subdirektorat statistic, h. 18

sehat bagi seluruh masyarakat. Sumber daya manusia yang sehat akan mendukung pembangunan nasional di segala aspek.

- e. Perumahan masyarakat yaitu badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.⁵⁷

BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat, terdiri dari lima tingkat kesejahteraan, yaitu:⁵⁸

- a) Tahap Keluarga Pra Sejahtera yaitu tahap keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang tidak memiliki salah satu dari 6 (enam) indikator keluarga sejahtera I atau indikator kebutuhan dasar keluarga.
- b) Tahapan Keluarga Sejahtera 1 tahap keluarga sejahtera 1 adalah keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan keluarga sejahtera 1, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8

⁵⁷ Ibid. h. 67-68

⁵⁸ Heri Risal Bungkaes, J.H Posumah, Burhanuddin Kiya, "Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaund". Journal Acta Diurnal Edisi (April 213), h. 8.

(delapan) indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologi.

- c) Tahap Keluarga Sejahtera II yaitu tahap keluarga sejahtera II merupakan keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan keluarga I dan delapan indikator keluarga sejahtera II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator keluarga sejahtera III atau indikator kebutuhan pengembangan.
- d) Tahap Keluarga sejahtera III yaitu tahapan keluarga sejahtera III adalah keluarga yang memenuhi 6 (enam) indikator tahapan keluarga I, dan 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II dan 5 (lima) indikator keluarga sejahtera III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator keluarga sejahtera III plus atau indikator aktualisasi diri.
- e) Tahap Keluarga sejahtera III plus yaitu tahap Keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator keluarga sejahtera I, delapan indikator keluarga sejahtera II, 5 (lima) indikator keluarga sejahtera III, serta dua indikator tahapan keluarga sejahtera.

3. Konsep kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan menurut Islam meliputi Kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya indikator Kesejahteraan karena pada dasarnya harta

hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. *Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yufihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Pada umumnya Kesejahteraan sendiri dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, beberapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan yang kita rasakan, memiliki anak yang sholeh dan solehah, dan lain sebagainya.⁵⁹ Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-satunya indikator untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT.

4. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Agama Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama Islam. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan oleh agama Islam bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika

⁵⁹ *Ibid*, Ziauddin Sardar. h, 391-401

manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya.⁶⁰

Ayat-ayat Al-qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersirat) dan ada yang secara tidak langsung (tersurat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi, namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Allah berfirman dalam (Qs. Al-Nahl: 97).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artiya: “barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁶¹

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadanya. Allah SWT jugakan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai

⁶⁰ Agung Eka Purwana, *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Justitia Islamica, Vol. 11/No.1/ jan,-juni 2014.

⁶¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya Al- Hikmah, Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 278.

dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.⁶²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

Ekonomi islam adalah ekonomi yang memiliki empat nilai utama, yaitu *Ilahiyyah*, akhlak, kemanusiaan, dan petengahan, dimana nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi Islam itu adalah:⁶³

- a) Ekonomi *Ilahiyyah* karena awalnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi dikaitkan pada prinsip *Ilahiyyah* dan tujuan *Ilahiyyah*, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Mulk (67) ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

⁶² Ibid. Agung Eka, h. 67.

⁶³ Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.

*Artinya : dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu. Maka berjalanlah desegala punjurunya dan makanlah sebagian rezeqi-nya, dan hanya kepadanya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*⁶⁴

- b) Ekonomi Akhlak Yaitu ekonomi Islam yang memadukan antara ilmu dan akhlak, karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Seorang muslim baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, tidak bebas mengerjakan apa yang diinginkannya atau apa yang menguntungkannya. Masyarakat muslim juga tidak bebas memproduksi berbagai macam barang, mendistribusikan, mengeluarkan, dan mengonsumsinya tetapi terikat oleh undang-undang islam dan hukum syariatnya.
- c) Ekonomi Kemanusiaan merupakan ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, mengingat tidak ada pertentangan antara aspek *Ilahiyyah* dengan aspek Kemanusiaan, karena menghargai kemanusiaan adalah bagian dari prinsip *Ilahiyyah* yang memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai Khalifah dimuka bumi.
- d) Ekonomi Pertengahan merupakan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, anantara individu dan masyarakat. Di dalam indivisu di seimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati, antara realita dan fakta.

⁶⁴ Departemen Agama RI Al-Qur'an da Terjemahnysa Al- Hikmah, Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 563.

- e) Kesejahteraan Perorangan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan.
- f) Kesejahteraan Masyarakat kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.⁶⁵



⁶⁵ *Ibid*, Rudi Badrudin, h. 145.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ridwansyah, *Pendidikan Dasar Perbankan Syariah*, Kumpulan Diklat Pembiayaan, Lampung, 2009.

Pedoman Penulisan Skripsi, intellectuality- Spirituality- Integrity. Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2017/2018.

P3EI, (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam) *ekonomi Islam*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jakarta: Rajawali pers, 2013.

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan perdesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Dokumentasi, profil Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Tahun 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Aksara, 2012.

Emzir, metode penelitian pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

Sugiyono, metodelogi penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2011.

HAW Widjaja, *Otonomi Desa (merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh)*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014.

Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintah Desa dan Kelurahan
Direktorat Jendral Pemeberdayaan Masyarakat Dan Desa,
Depatemen Dalam Negeri 2007.

Ahmad Qodri, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan
Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*, Jakarta: LECPress, 2003.

Herry Kamaroesid, *Tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDES*,
Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

David Wijaya, *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*, Yogyakarta: Gava
Media, 2018.

Gabriel Hany Kusuma dan Nurul Purnamasari, *BUMDES Kewirausahaan
Sosial yang Berkelanjutan*, Jakarta: penabulu foundation, 2016.

Gathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Isalam*, Jakarta: Sinar Grafika,
2013.

Adiwarman Karim, *Sejahtera Pemikir Islma*, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2012.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istihlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan
dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media,
2012.

Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Kultural*,
Jakarta: Lantabora PRESS, 2005.

Yusuf al-Qadharawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupanb Modern*, Kairo:
Makabah Wabah, 2009.

Rudy Bahrudin, *ekonomi otonomi desa*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012.

Subdirektorat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan* 2000, Jakarta: badan pusat statistic, 2008.

Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya Al- Hikmah, Bandung: CV Diponegoro, 2010.

Jurnal

Surwo Budiarto, Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Samarang, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 4, 2016.

Edy yusuf agunggunanto dkk, Pengembangan Desa Mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Vol. 13 No 1, 2016.

Amirus Sidiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No 2, Desember 2015.

Khairul Amri, Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (*BUMDES*), *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 13 No 3, Juli 2015.

Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Vol. 28 No. 2, 2016.

Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (Pades) Serta Membutuhkan Perekonomian Desa, *jurnal Of And Development*, Vol. 5 No. 1, 2014.

Bela aldila dkk. Factor-faktor yang berhubungan dengan peranan pengurus badan usa usaha milik pekon di pekon Gisting bawah, JILA, Vol. 6 No. 2, 2018.

Dewi Kirowati, lutfiyah dwi S. pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa studi kasus, Desa Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* Vol, 1 No. 1, Mei 2018.

Ratna Aziz Prasetyo, Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Dialektika* Vol. XI No.1 2016.

Hasyemi Rafsanzani, dkk, *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Study Pada Dasa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Public (JAB), Vol. 1, No. 4,, 2016

Ketut Gunawan, *Manajemen BUMDES Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi, Dalam WIDYATECH Jurnal sains dan Teknologi*, Vol. 10 No.3 April 2011.

Singgih Tri Atmojo, kris Herdrijanto, “*Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, dalam Jurnal Kesejahteraan Sosial UNEJ (jember), Vol, 1. No 1, 2016.

Ziauddin Sardar, Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam, Sardar, *et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 5, Mei 2016.

Muslimin kara, “*Pemikiran As-syathibi Tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*”. Vol. 2 No. 2, 2015.

Heri Risal Bungkaes, J.H Posumah, Burhanuddin Kiya, “*Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaund*”. Journal Acta Diurnal Edisi, April 213.

Agung Eka Purwana, *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Justitia Islamica, Vol. 11/No.1/ jan,-juni 2014.

Wawancara

Sudono, Kepala Suku 1 B (wawancara), Pekon Gisting Bawah, 15 Agustus 2019.

Santo, Masyarakat Pekon, (wawancara), Pekon Gisting Bawah, 15 Agustus 2019.

Supriyadi, Masyarakat Pekon,(wawancara), Pekon Gisting Bawah,15 Agustus 2019.

Santi, Masyarakat Pekon, (*wawancara*), Pekon Gisting Bawah, 15 Agustus 2019.

Lilis, ketua BUMDES, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Andi Juanda, pengurus PAM Pekon/Air Bersih, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Lukas dwiputranto, pengurus BUMDES, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Suyanto, selaku pengurus unit usaha ternak Kambing. (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Dodi, masyarakat pekon, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Lukman, masyarakat pekon, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

suryadi, masyarakat pekon, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Yanto, masyarakat pekon, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Mardiana, masyarakat pekon, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Wartini, masyarakat pekon, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Sumuni, Ambar Ulan, Pengurus BUMDES, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

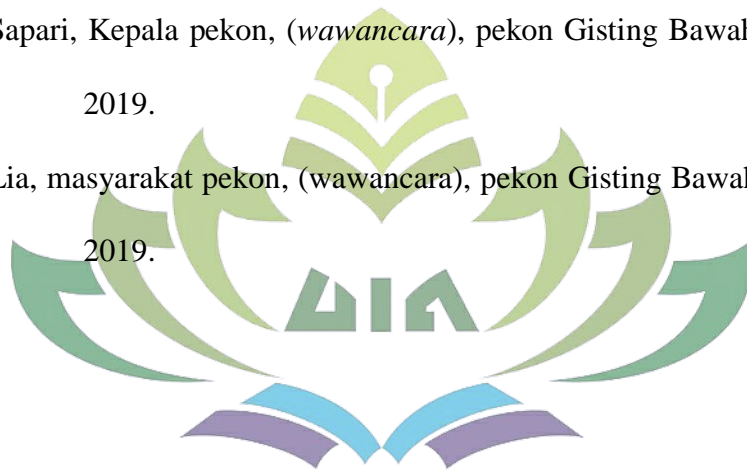
Juki, masyarakat pekon , (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Dedi, masyarakat pekon, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Martini, masyarakat pekon, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Sapari, Kepala pekon, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.

Lia, masyarakat pekon, (*wawancara*), pekon Gisting Bawah, 16 september 2019.



PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**(Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Bersatu Pekon
Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus**

Provinsi Lampung)

Oleh

DESMASUSILAWATI

1551010162

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM**

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

A. Pemerintahan Desa dan Pengurus BUMDES

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Hari, Tanggal :

Lokasi Wawancara :

1. Menurut Bapak/Ibu apa saja kekayaan asli desa yang dapat dikelola oleh BUM-Pekon Mandiri Bersatu?
2. Bagaimana proses awal pendirian BUM-Pekon?
3. Apakah pengurus bersosialisasi kepada masyarakat mengenai BUM-Pekon Mandiri Bersatu?

4. Apakah sebelum dan sesudah adanya BUM-Pekon Mandiri Bersatu membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya BUM-Pekon?
6. Apa rencana pengelola BUM-Pekon Mandiri Bersatu untuk memajukan unit-unit usaha yang ada di BUM-Pekon Mandiri Bersatu?
7. Adakah rencana membuka unit usaha baru sehingga dapat lebih membantu masyarakat Pekon Gisting Bawah?
8. Apakah adanya BUM-Pekon Mandiri Bersatu dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Pekon Gisting Bawah?
9. Berapa modal awal BUM-Pekon Mandiri Bersatu?
10. Dapat dari mana saja modal awal tersebut dan berapa persentase kontribusinya untuk pemerintah pekon Gisting Bawah?
11. Bagaimana pembagian hasil masing-masing dari unit usaha tersebut?
12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengaruhnya terutama terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat setelah adanya unit-unit usaha yang berada di naungan BUM-Pekon Mandiri Bersatu?
13. Adakah kendala dalam mengelola atau menjalankan unit-unit usaha yang ada di BUM-Pekon Mandiri Bersatu?
14. Adakah kegiatan usaha BUM-Pekon Mandiri Bersatu dalam pengembangan ekonomi masyarakat pekon?
15. Jasa pelayanan seperti apa yang di berikan oleh BUM-Pekon Mandiri Bersatu kepada masyarakat?

B. Masyarakat Pekon

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal di pekon Gisting Bawah?
2. Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
3. Apakah anda mengetahui adanya BUMDES?
4. Apakah anda merupakan salah satu anggota dari kegiatan unit usaha yang dikelola BUM-Pekon Mandiri Bersatu?
5. Bagaimana perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya BUM-Pekon Mandiri Bersatu?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan penyuluhan maupun seminar yang dilaksanakan oleh BUM-Pekon Mandiri Bersatu?
7. Berapa pendapatan Bapak/Ibu setiap bulan?
8. Apakah pendapatan Bapak/Ibu cukup untuk biaya konsumsi yang dikeluarkan?
9. Bapak/Ibu mempunyai anak berapa? Dan apakah anak ibu/Bapak bersekolah semua?
10. apakah rumah yang di tempati Bapak/Ibu merupakan milik sendiri atau menyewa dari orang lain?

DOKUMENTASI



Kantor BUM-Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah
Kecamatan Gisting Kabupateng Tanggamus.



Dokumentasi Bersama Pengurus Unit Usaha Bank Sampah, Milik
BUM-Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan
Gisti.



Dokumentasi bersama pengurus unit usaha ternak kambing
milik BUM-Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah.
Kecamatan Gisting, Kabupateng Tanggamu



Dokumentasi bersama pengurus unit usaha PAM Pekon dan
unit usaha Pariwisata milik BUM-Pekon Mandiri Bersatu di Pekon
Gisting Bawah kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.



Dokumentasi bersama masyarakat Pekon Gisting Bawah,
Kecamatan Gisting, Kabupateng Tanggamus.



Daftar Nama Informan Masyarakat Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting

Kabupaten Tanggamus

No	Nama Responden	Karakteristik Responden
1	Sapari	Kepala Pekon
2	R. Agung prastowo	Sekretaris Pekon
3	Lilis Setiawati	Ketua BUMDES
4	Noni Nur Fitriana	Sekretaris
5	Septiana	Bendahara
6	Andi Juanda	Unit PAM Pekon
7	Supriyadi	Unit Bank Sampah
8	Andreas Haryadi	Unit Pariwisata
9	Supriati	Unit Cathering
10	Luikas Dwiputranto	Unit Penyewaan GSG
11	Suyanto	Unit Ternak Kambing
13	Sudono	Masyarakat
14	Susanto	Masyarakat
15	Supriyadi	Masyarakat
16	Santi	Masyarakat
17	Dodi	Masyarakat
18	Lukman	Masyarakat
19	Suryadi	Masyarakat
20	Yanto	Masyarakat
21	Mardiana	Masyarakat
22	Wartini	Masyarakat
23	Juki	Masyarakat
24	Dedi	Masyarakat
25	Martini	Masyarakat
26	Lia	Masyarakat
27	Dodi	Masyarakat
28	Wati	Masyarakat
29	Dian	Masyarakat
30	Fitri yani	Masyarakat
31	Amrul	Masyarakat
32	Setiono	Masyarakat